



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUFRIDAH
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 93559

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.090.000.000**

1. Tanah Seluas 247 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/117 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 495 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 3065 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 1070 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 1400 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
9. Tanah Seluas 1550 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
10. Tanah Seluas 682 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 130.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 7.140.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.080.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.230.220.000****III. HUTANG****Rp. 123.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.107.220.000**



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Oktober 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.